LPPM SINTESA XX.EDITION MEI.2024

Majalah Tahunan Sintesa

INDIKATOR

Find us on:

Attributed to: SINTESA

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB: Ade Zahra & Najma Alya Jasmine

TATA LETAK: Tasya Melyana Kusuma Dewi

KONTRIBUTOR: Devira Khumaira, Nasywa Putri Wulandari, Restu Widhianto, Annisa Dewi Maharani, Garneta Jeconia Venus Firstynio, Alit Akhiral, Embun Tabitha Suswandari, Salsabilla Azzahra Octavia, Ade Zahra, Najma Alya Jasmine

PENYUNTING: Berlin Syahputra Situmorang & Salma Yubdina

PENGANTAR REDAKSI

"Everybody counts in applying democracy. And there will never be a true democracy until every responsible and law-abiding adult in it, without regard to race, sex, color or creed has his or her own inalienable and unpurchasable voice in government."- Carrie Chapman Catt

Kutipan dari Carrie Chapman di atas yang mengingatkan kita bahwa "Setiap orang memiliki peran dalam menerapkan demokrasi. Dan tidak akan ada demokrasi yang sejati sebelum setiap orang dewasa yang bertanggung jawab dan taat hukum di dalamnya, tanpa memandang ras, jenis kelamin warna kulit, atau keyakinan, memiliki suara yang tak dapat dijual dan tidak dapat dicabut dalam pemerintahan," menjadi pendorong di balik eksplorasi kami dalam edisi khusus tahun 2023 yang beriringan dengan momentum pesta demokrasi Indonesia, yakni pemilu 2024. Dalam perjalanan demokrasi yang penuh tantangan, sebagai seorang mahasiswa kita selayaknya merenungi dan mengkritisi arti dari implementasi demokrasi dan menyadari pentingnya representasi politik yang merata di dalamnya.

Pada substansi majalah ini kita akan mencermati bagaimana harapan demokrasi sejati mewujudkan diri dalam partisipasi setiap warga negara, tanpa pandang bulu. Sebab, pemilu 2024 seharusnya bukan sekadar seremoni politik saja, tetapi juga merupakan panggung di mana setiap suara, tanpa memandang latar belakang harus memiliki makna.

Oleh karenanya, kami mengajak Anda untuk menyelami diskusi mendalam mengenai berbagai isu krusial yang ada dalam majalah ini dengan menyoroti urgensi perwakilan yang mencerminkan keberagaman. Selamat menikmati tulisan-tulisan ini. Akhir kata, semoga pembahasan yang disajikan majalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam bentuk apapun.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI

ORDER #0001

MAY 2024

- -

SUSUNAN REDAKSI 01

PENGANTAR REDAKSI 02

DAFTAR ISI 03

CHAPTER 1

TILIK

KEPENTINGAN DAN HEGEMONI:
HILANGNYA HURUF ITU DI WIRACANITA 04

CHAPTER 2

GURAT

GURAUAN 24 06

SURAT 3 AYAT 50 06

CHAPTER 3

WACANA

MENILIK EFEKTIVITAS KUOTA AFIRMASI PEREMPUAN
LEWAT POLEMIK BAGI-BAGI KURSI 07

TILIK

MEMBANGUN SIKAP PEDULI POLITIK
DI MASA PEMILU 11

PERAN GEN Z DALAM REPRESENTASI DEMOKRASI PADA PILPRES
2024 MELALUI APLIKASI X 13

-THANKYOU- PAID -THANKYOU-

KEPENTINGAN DAN HEGEMONI: HILANGNYA HURUF ITU DI WIRACANITA

PENULIS:
EMBUN THABITHA SUSWANDARI

Bagaimana jika ketidakmampuan rakyat di Wiracanita dalam melafalkan Huruf Itu disebabkan oleh alasan personal pemimpinnya? Dan ketidakbisaan itu adalah bagian dari agenda setting Zaliman Yang Mulia, seorang pemimpin baru di Wiracanita, dalam melenggangkan kekuasaannya. Pada umumnya, salah satu huruf yang paling sulit untuk diartikulasikan secara jelas adalah R, begitu juga dengan warga Wiracanita sebelum Zaliman Yang Mulia berkuasa. Namun, kekuasaan Zaliman Yang Mulia meluluh-lantahkan kemampuan rakyat Wiracanita untuk melafalkan Huruf Itu.

Melalui maklumatnya, berbagai larangan diberlakukan. Aturan bicara dibatasi, buku-buku miring mulai disortir, dan kamus harus diganti. Namun, kekuasaan besar yang dimiliki Zaliman membuatnya ingin menjadi pemimpin yang sempurna. Rekam jejak hidupnya dikubur rapat-rapat kemudian menuturkan kalimat mutiaranya, “Rakyat yang sabar disayang Zaliman.” Itulah cara Zaliman Yang Mulia untuk menundukkan rakyatnya. Salah satunya adalah Lamin, penjual pisang yang juga bekerja di toko buku Sastraloka dan diancam harus menjadi Abdi Magang Adikamus yang bertugas untuk mengubah kamus bahasa agar tidak ada lagi Huruf Itu di Wiracanita.

Meningkatnya permintaan pisang di Wiracanita bersinggungan dengan kembali dipublikasikannya tulisan miring milik Bagus Prihardana. Pisang adalah komoditas utama dan makanan pokok rakyat Wiracanita sehingga anomali eskalasi pisang menjadi hal yang diperhatikan oleh sebagian besar rakyat Wiracanita. Oleh sebab itu, sampul buku cerita Zaliman Yang Mulia dan nasib rakyat Wiracanita bergambar pisang sebagai simbol kehidupan Wiracanita.

Sesuai dengan judul novel ini, CADL: sebuah novel tanpa huruf E, seluruh ceritanya disusun dengan meniadakan huruf E. Bahkan, huruf E pun disebut dengan “Huruf Itu”. Gaya ini sungguh menarik, bukan bagi para penggemar karya sastra Indonesia? Ketika membaca novel tersebut, pembaca bagaikan sedang menjadi korban hegemoni seperti warga Wiracanita. Nama tokoh yang digunakan juga tidak lazim, seperti (Ke)lamin, (Ba)jingan dan (Ja)hanam. Penamaan tersebut merupakan simbol bahwa tidak ada nama baik yang menjadi identitas di rakyat Wiracanita. Tidak ada hal yang aneh atau mengganjal dari rangkaian kata serta kalimat tanpa Huruf Itu. Meskipun demikian, plot maju-mundur yang disajikan cukup membingungkan. Hal ini karena perkenalan banyak tokoh dengan potongan-potongan alur cerita campur sehingga sedikit membosankan pada bagian satu per empat pertama dalam buku.

Sang penulis, Triskaidekaman menyajikan cerita rakyat Wiracanita dalam puzzle misteri. Bagaikan membaca cerita crime yang menguak rahasia pada dua periode waktu yang saling berkaitan, yaitu Zaliman Yang Mulia sebelum memimpin dan Zaliman Yang Mulia ketika memimpin. Bahkan, tujuan utamanya Lamin bukanlah untuk menggugurkan Zaliman, tetapi ketakutan Zaliman itu sendirilah yang membinasakan rakyatnya. Meskipun selalu ada segelintir orang yang selalu ingin menggerakkan perubahan ke arah yang lebih menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia di setiap periode, salah satunya adalah Lamin. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melalui manuskrip satir dan menggunakan nama palsu sebagai penghilang jejak. Pemerintahan Wiracanita yang dipimpin dengan kediktatoran yang harus mengikuti kemauan Yang Mulia atau yang membangkang hidupnya akan dihilangkan menjadi alasan mengapa sebaiknya siapa yang mengkritik pemerintah tidak menunjukkan nama aslinya. Seperti Bagus Prihardana, nama penulis manuskrip yang dilarang Zaliman Yang Mulia.

Meskipun cerita yang digambarkan berlatar belakang pemerintahan yang diktator, novel CADL: sebuah novel tanpa huruf E bisa menjadi sebuah refleksi bagi pembaca yang hidup di negara demokrasi. Jika pemusnahan manuskrip miring Bagus Prihardana dan buku miring lainnya terjadi di negara demokrasi, bukankah sebenarnya adalah bentuk lain dari sebuah pengkhianatan pemerintah itu sendiri? Bahkan mengarahkan pada degradasi makna "Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" dan hanya menjadi sebuah jargon semata dengan tingkat implementasi rendah. Pengkhianatan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya menguji kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang sedang memimpin. Ketahanan akuntabilitas adalah salah satu pilar dalam menegakkan demokrasi.

Tidak ada yang menjamin bahwa praktik pemerintahan di Indonesia bisa selamanya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Seperti, kejanggalan-kejanggalan terhadap perubahan konstitusi yang seharusnya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, tetapi kenyataanya menguntungkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Bahkan, aspek kebebasan dalam berekspresi atau menyampaikan kritik belum sepenuhnya terlepas dari represi aparat.

JUDUL	CADL: SEBUAH NOVEL TANPA HURUF E
PENULIS	TRISKAIDEKAMAN
TAHUN TERBIT	2020
PENERBIT	GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA
JUMLAH HALAMAN	282 HALAMAN
GENRE	NOVEL FIKSI

GURAT

Gurauan 24 - Restu Widhianto

Di tengah perjalanan ku berhenti
Dibawah tenda biru
Yang diterangi lampu kota
Untuk memesan secangkir kehangatan

Kopi hitam panas telah diseduh
Oleh wanita paruh baya
Yang mengais rezeki
Dari satu bungkus gorengan hangat

Tak berselang lama
Tukang ojek ikut berlabuh
Dengan armada sepeda mesin tuanya
Hasil jerih payah puluhan tahun

Seketika suasana hening pecah
Ketika ku mencoba membuka percakapan
Dengan basa basi
Alat-ala orang Jawa

Semuanya tertawa
Dengan kondisi politik yang ada
Tak sedikitpun yang merasa
Itu berpengaruh terhadap nasibnya

Surat 3 Ayat 50 - Alit Akhiral

Cuaca mendung
Bermandi rasa lemas
Manusia ingat dengan hakikatnya
Euforia hanya jadi 2 detik
Kesenangan hanya jadi titik
Berakhir,
Di kala lemas, memelas

Kau tahu saudara
Pesta telah jadi ruang semu
Bicara soal rakyat,
Bicara soal mandat,
Bicara soal kesumat,
Hanya bagai tebu yang manisnya lekat di mulutmu

Berapa kali kau menangis
Sang Ibu dan Si Bapak
Mungkin kami anak durhaka
Yang mendapat siksa karna bekas-bekas koruptif
Didalamnya tlah terpatri pada ingatan-ingatan kolektif

Ada yang ingin pergi
Ada pula yang ingin singgah
Tapi tiada yang menetap

Ini sudah jadi musibah
Bak dalam ayat-ayat Sansekerta
Sebut saja Indonesia-pura
Kisahnya berisi wayang, suka pura-pura

MENILIK EFEKTIVITAS KUOTA AFIRMASI PEREMPUAN 30 PERSEN LEWAT POLEMIK BAGI-BAGI KURSI

PENULIS:
DEVIRA KHUMAIRA
NASYWA PUTRI WULANDARI

Merujuk pada struktur sosial masyarakat Indonesia, perempuan sering kali dianalogikan sebagai warga negara kelas dua (Moerdijat dalam Media Indonesia, 2023). Perempuan dinilai tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki, khususnya dalam beberapa sektor krusial, termasuk sektor politik. Berkembangnya stigma negatif yang menyatakan bahwa perempuan hanya pantas bekerja di ranah domestik (rumah tangga) menjadi faktor utama penyebab cenderung termarjinalkannya perempuan dalam politik (Putri, 2022). Berdasarkan realita di lapangan, keberadaan perempuan dalam politik memang masih dipandang sebelah mata. Eksistensi perempuan seolah-olah sebagai pelengkap saja. Namun, adanya perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan tuntutan membuat isu perempuan dan politik menjadi semakin penting, terutama yang termanifestasikan melalui representasi perempuan di parlemen. Hal tersebut tidak boleh dianggap remeh, melainkan menjadi prioritas yang harus diperhatikan.

Kuota afirmasi perempuan 30% yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengupayakan peningkatan representasi perempuan di parlemen. Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, representasi perempuan menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu. Meski menjadi sebuah terobosan yang terbilang apik, pemberlakuan kuota afirmasi perempuan 30% menuai berbagai polemik bernada sumbang dalam implementasinya. Salah satu bukti konkretnya dapat dilihat dari polemik bagi-bagi kursi. Saat ini, timbul kekhawatiran, baik dari masyarakat umum, akademisi, ataupun pemerintah itu sendiri akibat polemik bagi-bagi kursi. Lantas muncul pertanyaan, apakah kuota afirmasi perempuan 30% sebenarnya efektif sehingga perlu terus diberlakukan?

Perkembangan Representasi Perempuan di Parlemen

Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697. Skor tersebut menunjukkan tingginya tingkat ketimpangan gender, membuat Indonesia menempati peringkat ke-87 dari 146 negara apabila diurutkan dari negara yang memiliki indeks ketimpangan gender terendah (World Economic Forum, 2023). Inilah yang kemudian membuat pemerintah terus berupaya menciptakan terobosan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kemasyarakatan, salah satunya melalui pemberlakuan kuota afirmasi perempuan 30% untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor politik. Secara lebih jelas, kuota afirmasi perempuan 30% diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".

Pemberlakuan kuota afirmasi perempuan 30% telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam bursa pemilu. Data menunjukkan bahwa nominasi calon anggota legislatif perempuan dari tahun 2004 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 25% (Prihatini, 2020). Meningkatnya partisipasi perempuan ini juga tidak terlepas dari peran inisiator yang secara tidak langsung telah membuktikan kesuksesan karirnya di bidang politik, seperti halnya Haeriah Rahman, mantan ketua komisi III DPRD Kabupaten Maros periode 2014-2019 yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Maros periode 2019-2024 (MAMPU, 2016). Haeriah Rahman telah membuktikan bahwa perempuan yang selama ini cenderung termarjinalkan, bisa menjadi sosok berpengaruh yang memegang kekuasaan.

Polemik Bagi-Bagi Kursi dan Implikasinya

Pada realitanya, niat baik pemerintah untuk mengurangi tingkat ketimpangan gender melalui pemberlakuan kuota afirmasi perempuan 30% justru menjadi awal bagi munculnya masalah-masalah baru. Dengan pemberlakuan regulasi tersebut, parpol mau tidak mau harus memenuhi syarat minimal 30% partisipasi calon anggota legislatif perempuan agar bisa maju dalam bursa pemilu. Akibatnya, parpol yang tidak memiliki cukup calon anggota legislatif perempuan akan 'membagikan kursinya' kepada kader perempuan lain di luar internal parpol yang kurang atau bahkan tidak memiliki kapabilitas berpolitik. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai polemik bagi-bagi kursi. Secara tidak langsung, polemik bagi-bagi kursi telah menghilangkan fungsi rekrutmen politik, yakni fungsi parpol untuk mencari individu berkompeten agar mau bergabung dalam parpol (LaPalombara & Anderson dalam Hawkesworth & Kogan, 2002).

Lebih lanjut, kuota afirmasi perempuan 30% membuat proses rekrutmen dan kaderisasi berlangsung secara instan. Padahal, proses tersebut memegang peranan yang penting dalam upaya peningkatan kapabilitas berpolitik calon anggota legislatif (Niron & Seda, 2021). Hal ini akan berimplikasi pada timbulnya dua kemungkinan buruk, baik dalam pemerintahan maupun pemilu. Kemungkinan pertama adalah tidak terwakilinya isu-isu perempuan di parlemen. Padahal, tujuan utama representasi perempuan di parlemen itu sendiri adalah tersuarakannya isu-isu perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta kematian ibu dan bayi. Upaya pengadvokasian isu-isu perempuan menjadi terhambat karena calon anggota legislatif perempuan terpilih tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyuarakan isu-isu tersebut.

Merujuk pada struktur sosial masyarakat Indonesia, perempuan sering kali dianalogikan sebagai warga negara kelas dua (Moerdijat dalam Media Indonesia, 2023). Perempuan dinilai tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki, khususnya dalam beberapa sektor krusial, termasuk sektor politik. Berkembangnya stigma negatif yang menyatakan bahwa perempuan hanya pantas bekerja di ranah domestik (rumah tangga) menjadi faktor utama penyebab cenderung termarjinalkannya perempuan dalam politik (Putri, 2022). Berdasarkan realita di lapangan, keberadaan perempuan dalam politik memang masih dipandang sebelah mata. Eksistensi perempuan seolah-olah sebagai pelengkap saja. Namun, adanya perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan tuntutan membuat isu perempuan dan politik menjadi semakin penting, terutama yang termanifestasikan melalui representasi perempuan di parlemen. Hal tersebut tidak boleh dianggap remeh, melainkan menjadi prioritas yang harus diperhatikan.

Kuota afirmasi perempuan 30% yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengupayakan peningkatan representasi perempuan di parlemen. Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, representasi perempuan menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu. Meski menjadi sebuah terobosan yang terbilang apik, pemberlakuan kuota afirmasi perempuan 30% menuai berbagai polemik bernada sumbang dalam implementasinya. Salah satu bukti konkretnya dapat dilihat dari polemik bagi-bagi kursi. Saat ini, timbul kekhawatiran, baik dari masyarakat umum, akademisi, ataupun pemerintah itu sendiri akibat polemik bagi-bagi kursi. Lantas muncul pertanyaan, apakah kuota afirmasi perempuan 30% sebenarnya efektif sehingga perlu terus diberlakukan?

Solusi Mengatasi Polemik Bagi-Bagi Kursi

Berdasarkan timbulnya kedua kemungkinan tersebut, proses rekrutmen dan kaderisasi calon anggota legislatif perempuan secara instan harus segera diakhiri, khususnya oleh parpol yang akan berkontestasi di Pemilu tahun 2024 mendatang. Perlu ditegaskan kembali, kuota afirmasi perempuan 30% tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi target yang harus dicapai agar tingkat ketimpangan gender bisa menurun dan isu perempuan bisa lebih tersuarakan di parlemen. Setiap parpol perlu melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi secara berkelanjutan serta selektif kepada calon anggota legislatif perempuan. Di samping itu, parpol juga perlu mem-branding dirinya agar terlihat menarik di mata kader perempuan yang memang kapabel dan memiliki kemampuan yang mumpuni, baik dalam berdialog, berkampanye, ataupun menyuarakan isu perempuan apabila terpilih nantinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan kuota afirmasi perempuan 30% tidak sepenuhnya efektif untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Meski partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif dalam bursa pemilu bisa meningkat, representasi perempuan di parlemen pada realitanya tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena parpol menerapkan proses rekrutmen secara instan, menyebabkan calon anggota legislatif perempuan yang berkontestasi tidak memiliki kapabilitas berpolitik, khususnya dalam berdialog dan berkampanye agar dirinya bisa terpilih. Perlu ada evaluasi dari pembuat kebijakan bersama stakeholder yang berwenang untuk mengkaji apakah kuota afirmasi perempuan 30% masih relevan untuk diberlakukan ataukah perlu ada perubahan substansi, seperti penurunan persentase.

REFERENSI

LaPalombara, J., & Anderson, J. (2002). "Political Parties". Dalam Encyclopedia of Government and Politics. London: Routledge.

MAMPU. (2016, 3 Desember). Kisah Ibu Ria, Anggota DPRD Maros yang Aktif Perjuangkan Isu Perempuan di Sulawesi Selatan. Diakses pada 17 November 2023 dari http://mampu.bappenas.go.id/cerita-perubahan/cerita/kisah-ibu-ria-anggota-dprd-maros-yang-aktif-perjuangkan-isu-perempuan-di-sulawesi-selatan/

Media Indonesia. (2023, 28 Juli). Kepemimpinan Tidak Melekat pada Gender. Diakses pada 17 November 2023 dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/600434/kepemimpinan-tidak-melekat-pada-gender

Naqiyyah, I. (2021). Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 1(2), 28-47. https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1108

Niron, E. S., & Seda, A. B. (2021). Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif (Studi tentang Pencalonan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019). Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 9(2), 203-228. http://dx.doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158

Prihatini, E. S. (2020, 3 November). Semua Partai Telah Memenuhi Kuota Caleg Perempuan, tapi Mengapa Jumlah Perempuan di Parlemen Tetap Sedikit?. Diakses pada 16 November 2023 dari https://theconversation.com/semua-partai-telah-memenuhi-kuota-caleg-perempuan-tapi-mengapa-jumlah-perempuan-di-parlemen-tetap-sedikit-147292

Putri, N. (2022, 22 Agustus). Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia. Diakses pada 17 November 2023 dari https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/

Sucahyo, N. (2018, 7 November). Mengapa Perempuan Tak Memilih Caleg Perempuan?. Diakses pada 11 Jamuari 2024 dari https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-memilih-caleg-perempuan-/4648178.html

World Economic Forum. (2023). Global Gender Gap Report 2023. Dalam World Economic Forum (Terbitan Juni).

MEMBANGUN SIKAP PEDULI POLITIK DI MASA PEMILU

Annisa Dewi Maharani   Garneta Jeconia Venus Firstynio

Sebagai seorang warga negara yang baik, masa-masa pemilihan umum merupakan waktu yang krusial. Dalam mencapai tujuan terpenuhinya pemilihan umum yang demokratis, warga negara perlu mengetahui berbagai informasi mengenai calon pemegang kekuasaan agar tidak salah memilih sehingga membawa kemunduran bagi suatu negara. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, tokoh Ernest “Bud” Johnson dalam film Swing Vote justru diceritakan sebagai warga negara yang apatis pada kehidupan politik domestiknya. Ayah tunggal yang berprofesi sebagai buruh pabrik itu hidup bersama Molly, yakni anaknya yang digambarkan sebagai anak perempuan yang melek politik. Molly membujuk Bud untuk menggunakan hak suaranya di hari pemilihan umum. Sayangnya, Bud tak kunjung hadir di tempat pemilihan hingga larut malam karena stres pasca PHK. Kesal dengan ayahnya, Molly bertindak nekat dengan diam-diam memanfaatkan hak pilih milik ayahnya. Ketika ia ingin memilih, aliran listrik yang terhubung dengan komputer di bilik suara terputus sehingga hak suara milik Bud tidak terhitung sah. Keesokan harinya, ternyata hasil suara sementara kedua calon presiden seimbang dan menjadikan Bud sebagai satu-satunya warga akan menentukan masa depan Amerika Serikat.

Isu tersebut menjadi pemberitaan panas yang memperoleh perhatian publik karena tersebar di seluruh negara bagian melalui media televisi. Posisi Bud Johnson sebagai seorang swing voter ini dimanfaatkan oleh kedua calon presiden untuk menggencarkan kampanye agar jatah suara terakhir jatuh kepada salah satu di antara mereka. Berbagai strategi dilakukan, seperti tindakan menyuap Bud, melaksanakan aksi bersama organisasi nonpemerintah (NGO), hingga saling menjatuhkan nama antarcalon presiden. Bud justru memanfaatkan privilege dan fasilitas yang diberikan oleh kedua calon tersebut hingga terlena dan lupa akan tujuan awalnya untuk memilih salah satu calon. Ketidaktegasan karakter Bud dan pengabaiannya terhadap keluarga memicu konflik batin dengan Molly dan menyebabkan ketidakstabilan emosi pada anak perempuannya itu hingga membawa Bud pada dua pilihan; kenikmatan privilege dari kedua calon atau anak perempuan satu-satunya yang memunculkan kesadaran akan kewajibannya sebagai warga sipil yang demokratis?

Identitas Film (dilansir dari letterboxd.com)

Judul : Swing Vote
Sutradara : Joshua Michael Stern
Penulis Cerita : Joshua Michael Stern dan Jason Richman
Genre : Drama, Comedy
Tanggal Rilis : 1 Agustus 2008
Negara Asal : Amerika Serikat
Pemeran : Kevin Costner, Paula Patton, Kelsey Grammer, Dennis Hopper, Nathan Lane, Stanley Tucci, George Lopez, Judge Reinhold

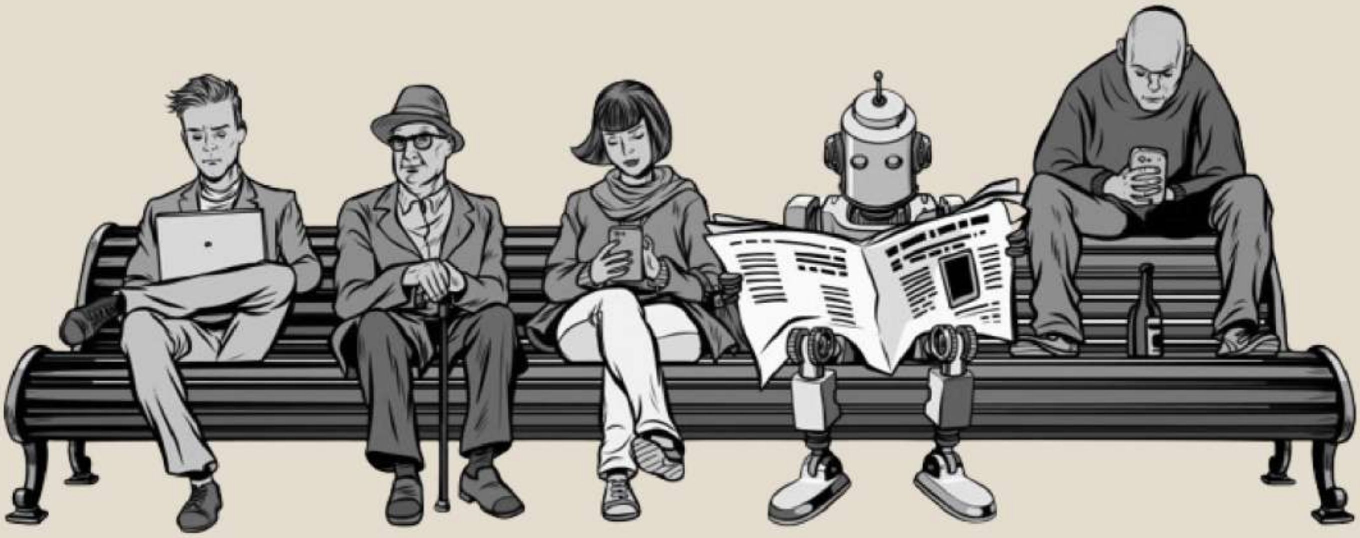

Sifat apatis yang dimiliki oleh Bud datang dari ketidakpercayaannya terhadap pemerintah. Menurut Bud, siapapun presiden yang memimpin tidak akan mengubah kehidupannya dan ia akan tetap terjerat dalam kemiskinan struktural. Nampaknya, hal ini tidak hanya terjadi pada Bud, tetapi juga pada masyarakat lainnya yang didukung oleh adegan di mana Bud menerima surat dari salah satu warga yang menceritakan betapa bobroknya sistem sosial ekonomi Amerika Serikat. Seiring berjalannya film ini, Molly berhasil mengubah cara berpikir Bud mengenai pemerintah—bahwa sejatinya peran warga dalam beraspirasi dibutuhkan untuk perbaikan dan perkembangan suatu negara. Bud mulai memedulikan kehidupan politik negaranya dengan mengajukan permintaan pengadaan debat presiden dengan Bud sebagai moderatornya. Dalam persiapannya, Bud mempelajari berbagai aspek penting yang harus ada dalam diri seorang presiden sekaligus membaca surat-surat aspirasi yang dikirim oleh warga—dengan harapan bahwa Bud akan menyampaikannya ketika debat presiden berlangsung.

"Never again be said that a single vote counts for nothing."

Unsur komedi dalam film ini tersirat dalam karakter kedua calon presiden yang berambisi memenangkan hati Bud melalui strategi kampanye mereka, terlepas itu sejalan dengan moral atau tidak, dengan penyajian adegan-adegan satire yang tertuju pada para penguasa di bangku pemerintahan—bahwa saat ini masih banyak dari mereka yang masih menormalisasi cara kotor untuk memenangkan hasil pemilihan. Keadaan tersebut membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah tahu sifat asli seorang calon presiden di balik kampanyenya untuk memenangkan agenda pemilihan umum sehingga penting untuk kita tidak bersikap apatis agar masa depan negara kita tidak jatuh di tangan pemimpin yang salah. Terlepas dari character development-nya di akhir film, karakter Bud di awal film bukan merupakan contoh warga negara yang baik, terlebih di waktu-waktu menjelang pemilihan umum ini. Apatisme politik merupakan hal yang wajib kita hindari dan hendaknya mulai menumbuhkan kepedulian terhadap dinamika politik domestik. Pesan moral film ini berhasil dikemas apik dengan menyatukan unsur drama dan komedi berdurasi 120 menit. Para aktor dan aktris film ini pun patut diacungi jempol, terkhusus Madeline Carroll, aktris pemeran tokoh Molly yang memainkan dialog bernuansa politik di usianya yang masih belia. Sayangnya, akses film ini dalam platform legal sangat terbatas sehingga memperkecil kemungkinan tersampaikannya pesan moral film pada penonton secara luas.

PERAN GEN Z DALAM REPRESENTASI DEMOKRASI PADA PILPRES 2024 MELALUI APLIKASI X

Aprila Kusuma Dewi & Nayla Syarifah Hiefra

Gambaran singkat tentang peran penting generasi Z dalam proses demokrasi dan menjelaskan mengapa X dipilih sebagai fokus representasi dalam Pilpres 2024

Pada Pemilu 2024, anak muda didapuk sebagai penyumbang suara terbanyak yang dapat menentukan masa depan Indonesia. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024, tercapai 204.807.222 orang - sekitar 55-60%, atau sekitar 106.358.447 pemilih di antaranya anak muda. Generasi milenial menyumbang suara terbanyak sebesar 33%; dan 23% pemilih di antaranya merupakan generasi Z. Berbekal kecerdasan dan kekritisan yang tinggi, mereka akan berperan penting dalam Pemilu 2024. Mereka akan menggunakan kemajuan di bidang teknologi informasi untuk turut serta dalam pemilihan kepala negara.

Pemanfaatan X sebagai ruang publik (public sphere) secara virtual memberikan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warganet. Karakteristik unik yang dimiliki X seperti jumlah pengikut (followers) yang besar dan sifatnya yang berjejaring, membuatnya menjadi pilihan utama bagi para buzzer dalam melakukan pemasaran (Prasetyo, 2023). Keramaian kritis yang tercipta dari banyaknya cuap buzzer menciptakan suatu representasi yang menjadi fokus dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Sementara itu, media sosial unjuk gigi sebagai medan tempur para buzzer, penggunaannya semakin marak dan tidak terelakkan menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, generasi Z dinilai sebagai generasi yang paling akrab dengan perkembangan informasi dan teknologi, terutama media sosial (Magan et al., 2022). Dengan keeratan hubungan tersebut, terbentuklah peran generasi Z dalam representasi demokrasi.

Bagaimana tagar dan trending topics mencerminkan opini dan perasaan generasi Z terkait Pilpres?

Ketika kampanye pemilihan presiden tahun 2024 dimulai, perhatian terhadap penggunaan X sebagai media komunikasi politik menjadi sorotan utama dan menjadi objek kajian yang intens.

Seiring perkembangan teknologi informasi, strategi komunikasi bagi kandidat presiden dan pendukungnya mengalami perubahan yang signifikan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kehadiran media sosial agar dapat berinteraksi efektif dengan masyarakat pemilih dan pendukung mereka. Fenomena ini muncul karena penggunaan X secara luas oleh warganet terutama generasi Z, yang turut aktif dalam menyuarakan opini dan partisipasi politik mereka. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang berperan dalam membentuk narasi politik. Melalui tagar dan trending topics, generasi Z mengungkapkan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap kandidat, kebijakan, atau isu-isu tertentu. Penggunaan tagar seperti #Pilpres2024 atau #GenerasiZMemilih dapat menjadi indikator partisipasi aktif generasi Z. Mereka sering menggunakan platform media sosial untuk membagikan informasi, mengajak teman-teman mereka untuk ikut memilih, dan menyuarakan preferensi politik mereka.

Setelah debat capres dan cawapres, terlihat banyak cuitan di X yang berasal dari generasi Z. Cuitan tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi termasuk terkait hasil debat. Pada setiap postingannya, generasi Z menuangkan berbagai bentuk pemikiran baik berupa kritik, saran, hingga sekadar komentar kecil terkait kondisi yang tengah terjadi. Postingan dari generasi Z ini seringkali menciptakan trending topic di X, mencerminkan representasi demokrasi, dan menunjukkan dampak signifikan dari partisipasi mereka dalam proses politik.

Analisis terhadap dampak influencer dan tokoh publik dalam membentuk opini politik generasi Z di X?

Membahas tentang kebebasan berekspresi sebagai bentuk pemberian opini oleh generasi Z, sedikit banyak kehadiran influencer dan tokoh publik turut memberikan dampak termasuk terkait hal politik. Influencer, misalnya. Sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di media sosial, mereka dapat menjadi agen perubahan opini. Mereka bisa membantu menyebarkan informasi politik, mendukung gerakan sosial, atau mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, terkadang opini yang saling bertentangan antar-influencer membuat audiens merasa bingung dalam membentuk pandangan politik yang konsisten. Sementara itu, tokoh publik yang terlibat dalam politik juga memiliki dampak besar. Partisipasi mereka dalam kampanye politik atau penyampaian pandangan politik dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan generasi Z. Sama seperti influencer, kehadiran tokoh publik pun juga dapat menciptakan sangsi. Adapun contoh nyatanya adalah ketika mereka terlibat dalam skandal ataupun kontroversi yang dapat mempengaruhi masyarakat ketika berpersepsi.

Jika dilihat secara objektif dan tetap merujuk pada fakta, keberadaan influencer dan tokoh publik tidak berpengaruh signifikan dalam pembentukan opini politik. Jiwa kritis yang dimiliki generasi Z apabila bersanding dengan rasa peduli dan teguh pendirian, akan tetap melahirkan sebuah keputusan yang bijak dan dapat dipertanggungjawabkan. Representasi akan tetap tercapai secara seimbang, bila memang generasi Z berhasil menjadi sosok yang tidak hanyut begitu saja melainkan dapat menyesuaikan diri dalam arus. Nyatanya, kubu-kubu pemikiran telah terbentuk dan menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya ketimpangan signifikan dalam representasi demokrasi kali ini.

Bagaimana generasi Z dapat berkontribusi untuk mengatasi tantangan dan kritik terkait representasi politik di X?

Mengatasi tantangan dan kritik terkait representasi politik di X, generasi Z lebih suka terlibat dalam diskusi aktif.

Mereka sering menantang narasi dominan dan mencoba melihat isu-isu politik dari berbagai perspektif. Melalui tagar, mereka sering mengajukan pertanyaan tajam, mendorong dialog yang lebih mendalam, dan memicu pemikiran kritis di antara sesama pengguna media sosial. Mereka mempertanyakan realitas dari janji-janji politik dan mencari pemahaman yang lebih baik tentang dampak praktis dari kebijakan tersebut.

Penutup

Keterlibatan generasi Z sebagai pemilih terbanyak dibersamai dengan penggunaan X sebagai alat ekspresi telah membentuk sebuah representasi demokrasi yang menggambarkan kecerdasan, kekritisan, dan semangat berkontribusi mereka dalam proses politik. Adapun sisi yang telah terlihat meliputi tagar dan trending topic yang digiring oleh generasi Z, keberadaan influencer dan tokoh publik yang tidak mempengaruhi opini mereka secara signifikan, serta keterlibatan mereka dalam diskusi aktif dari berbagai perspektif. Dengan demikian, peran generasi Z dalam Pilpres 2024 melalui aplikasi X menjadi bukti nyata bahwa masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan generasi muda yang penuh potensi ini.

•••••

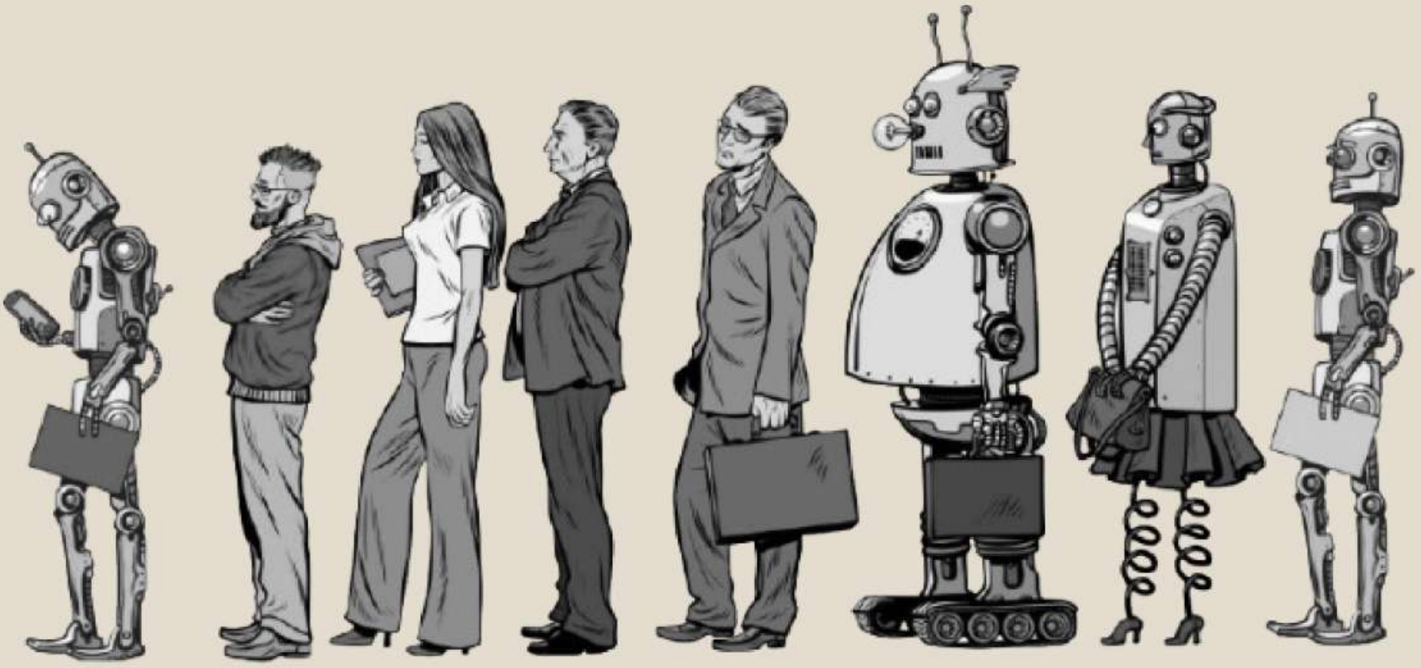

Find us on:
Attributed to:
SINTESA